

**ASPEK ETIKA HUKUM RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014**

TESIS



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Miftach Rizcha Afifi

02040422017

Dosen Pembimbing 1 :

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031000

Dosen Pembimbing 2 :

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.

NIP. 197911052007011019

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2024

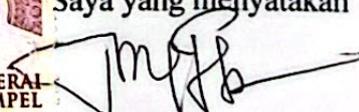
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftach Rizcha Afifi
NIM : 02040422017
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Aspek Etika Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2024

Saya yang menyatakan

Miftach Rizcha Afifi



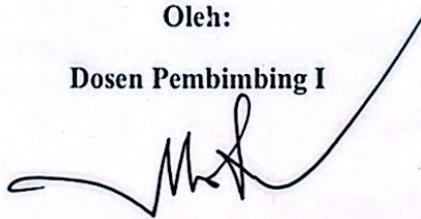
02040422017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Aspek Etika Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, yang ditulis oleh Miftach Rizcha Afifi NIM. 02040422017 ini telah disetujui pada tanggal 28 Maret 2024.

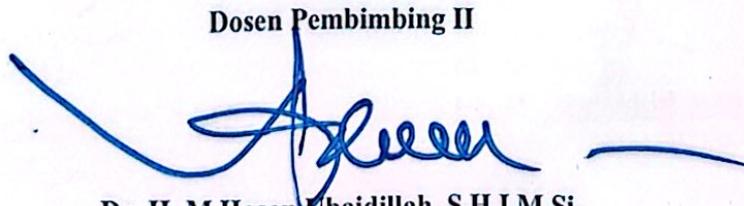
Oleh:

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Dosen Pembimbing II



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I.M.Si.
NIP: 19791105200711020

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Miftach Rizcha Afifi, NIM. 02040422017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasyah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Sekretaris Penguji

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I.M.Si
NIP: 19791105200711020

Penguji I

Prof. Dr. Sri Warjiyati, S.H, M.H
NIP: 19680826005012001

Penguji II

Dr. H. Muwahid, S.H, M.Hum
NIP: 19780310200711020

Surabaya,
Mengesahkan,
Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Direktori Pascasarjana,



Prof. Dr. Masdar Hilmy, M.Ag., Ph.D
NIP: 195021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftach Rizcha Afifi
NIM : 02040422017
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : afifrizcha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Aspek Etika Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2025

Penulis

(Miftach Rizcha Afifi)

Abstrak

Penelitian dengan Judul “Aspek Etika Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014” merupakan hasil penelitian hukum yang merujuk pada permasalahan rangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dimana jika dilakukan akan sangat rawan konflik kepentingan dan dapat melanggar etika. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek etikahukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara

Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normative dimana objek dari penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek etika hukum rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), melalui sumber bahan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, buku, karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi dan lain-lainnya serta data-data yang mendukung penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini disebutkan bahwasanya rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara menghadirkan berbagai tantangan terkait dengan integritas, transparansi dan akuntabilitas dan rawan dengan adanya konflik kepentingan. Sehingga penting bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika hukum dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang merupakan *legal base* yang harus dipahami bersama sebagai semangat menuju perubahan Pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian untuk menyukseskan implementasi Undang-Undang no. 5 Tahun 2014, selain didukung oleh peraturan-peraturan pendukung lainnya yakni perlu didukung oleh setiap instansi pemerintah dan para Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Kata Kunci: Etika Hukum, Rangkap Jabatan, Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I ASPEK ETIKA HUKUM RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ..	
Error! Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teoretik.....	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS ASAS HUKUM, KEPASTIAN HUKUM DAN GOOD GOVERNANCE	
A. Asas Hukum.....	4
B. Teori Kepastian Hukum.....	4
C. Teori Good Governance	4
BAB III ETIKA HUKUM RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARASEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA	
A. Urgensi Peraturan Perundang-undangan Terkait Rangkap Jabatan Oleh Aparatur Sipil Negara Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara	4
B. Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Sebagai Komisaris Di Badan Usaha Milik Negara	4
C. Asas Hukum	4

D. Teori Kepastian Hukum	4
BAB IV TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TERHADAP RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA	
A. Asas Hukum	4
B. Teori Kepastian Hukum	4
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Asas Hukum	4
B. Teori Kepastian Hukum	4



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, H., dan Mimin R. Kritik dan Otokritik LSM, Piramedia Jakarta, 2004. Ali, Z. 2015. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, D., & Sirojudin F. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin., & Zainal A. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Arifin, P. 2011. Soerja Atmadja, *Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan- Badan Hukum dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke 7* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Atmadja, A.P.S. Format Fungsi Publik Pemertintah dan Badan-Badan Hukum, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers: Jakarta.
- Bahrul Imi Yakup, Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia ; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Bruggink,JJ.H., Refleksi Tentang Hukum,PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Crysnadi, B. Rangkap Jabatan, disampaikan dalam P2TIK BKN 2014. Dault, A. 2012, *Menghadang Negara Gagal*, Renebook, Jakarta.
- Diantha, I.M.P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadeadia Group.
- Djarmika, S., & Marsono. 2009. *Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan*.
- Titik Triwulan, T. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PASCASARJANA

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. (031) 8410298 Fax. (031) 8413300
E-Mail: pasca@uinsa.ac.id Website: <https://uinsa.ac.id/pascasarjana>

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor: B-003/Un.07/11/DIR/WADIR/BP/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

NAMA : Miftach Rizcha Afifi
NIM : 2040422017
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara (HTN)

benar-benar anggota Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saat dikeluarkan surat keterangan ini, yang bersangkutan sudah *tidak memiliki pinjaman bahan pustaka* di Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Januari 2025

Direktur
Wakil Direktur



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.
NIP. 197510162002121001

Keterangan:

Mohon Surat Keterangan Bebas Pinjam ini disimpan untuk pengambilan Ijazah